

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta

4.1.1. Keadaan Geografis dan Demografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km² atau 1 % dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada di antara 110° 24' 19" BT dan 110° 28' 53" BT, 7° 49' 26" LS dan 7° 15' 24" LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi berpengaruh pada kondisi geologi. Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebanyak 482 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli s.d September (0 mm) pada tahun 2013.

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling

banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan bagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0.90	18	86
		2. Suryodiningratan	0.85	17	69
		3. Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2	Kraton	1. Patehan	0.40	10	44
		2. Panembahan	0.66	18	78
		3. Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3	Mergangsan	1. Brontokusuman	0.93	23	83
		2. Keparakan	0.53	13	57
		3. Wirogunan	0.85	24	76
			2.31	60	216
4	Umbulharjo	1. Giwangan	1.26	13	42
		2. Sorosutan	1.68	16	63
		3. Pandeyan	1.38	12	46
		4. Warungboto	0.83	9	38
		5. Tahunan	0.78	11	48
		6. Muja Muju	1.53	12	55
		7. Semaki	0.66	10	34
			8.12	83	326
5	Kotagede	1. Prenggan	0.99	13	57
		2. Purbayan	0.83	14	58
		3. Rejowinangun	1.25	13	49
			3.07	40	164
6	Gondokusuman	1. Baciro	1.06	21	88
		2. Demangan	0.74	12	44
		3. Klitren	0.68	16	63
		4. Kotabaru	0.71	4	21
		5. Terban	0.80	12	59
			3.99	65	275
7	Danurejan	1. Suryatmajan	0.28	15	45
		2. Tegalpanggung	0.35	16	66
		3. Bausasran	0.47	12	49
			1.10	43	160
8	Pakualaman	1. Purwokinanti	0.30	10	47
		2. Gunungketur	0.33	9	36
			0.63	19	83
9	Gondomanan	1. Prawirodirjan	0.67	18	61
		2. Ngupasan	0.45	13	49
			1.12	31	110

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
10	Ngampilan	1. Notoprajan	0.37	8	50
		2. Ngampilan	0.45	13	70
			0.82	21	120
11	Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0.44	10	51
		2. Wirobrajan	0.67	12	58
		3. Pakuncen	0.65	12	56
			1.76	34	165
12	Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0.46	23	89
		2. Sosromenduran	0.50	14	55
			0.96	37	144
13	Jetis	1. Bumiyo	0.58	13	56
		2. Gowongan	0.46	13	52
		3. Cokrodiningratan	0.66	11	60
			1.70	37	167
14	Tegalrejo	1. Tegalrejo	0.82	12	46
		2. Bener	0.57	7	25
		3. Kricak	0.82	13	61
		4. Karangwaru	0.57	14	56
			2.91	46	188
Jumlah		45	32,50	614	2.524

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015.

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah administratif Yogyakarta sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- Barat : Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai dengan Tahun 2013 penggunaan lahan yang mengalami perubahan secara signifikan adalah

guna lahan untuk sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Perubahan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel dibawah ini memperlihatkan gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 2008-2013.

Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk relatif kecil, yaitu -0,21. Adapun jumlah penduduk Tahun 2012 tercatat 394.012 orang dengan rincian 191.445 jiwa penduduk laki-laki dan 202.567 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadatan penduduk di Tahun 2012 adalah sebanyak 12.123 jiwa per km². Jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2013 adalah sebanyak 402.769 jiwa dengan rincian 195.712 jiwa penduduk laki-laki dan 206.967 jiwa penduduk perempuan. Pertambahan penduduk ini berdampak pada semakin tingginya kepadatan penduduk di Tahun 2013 yaitu menjadi 12.390 jiwa per Km².

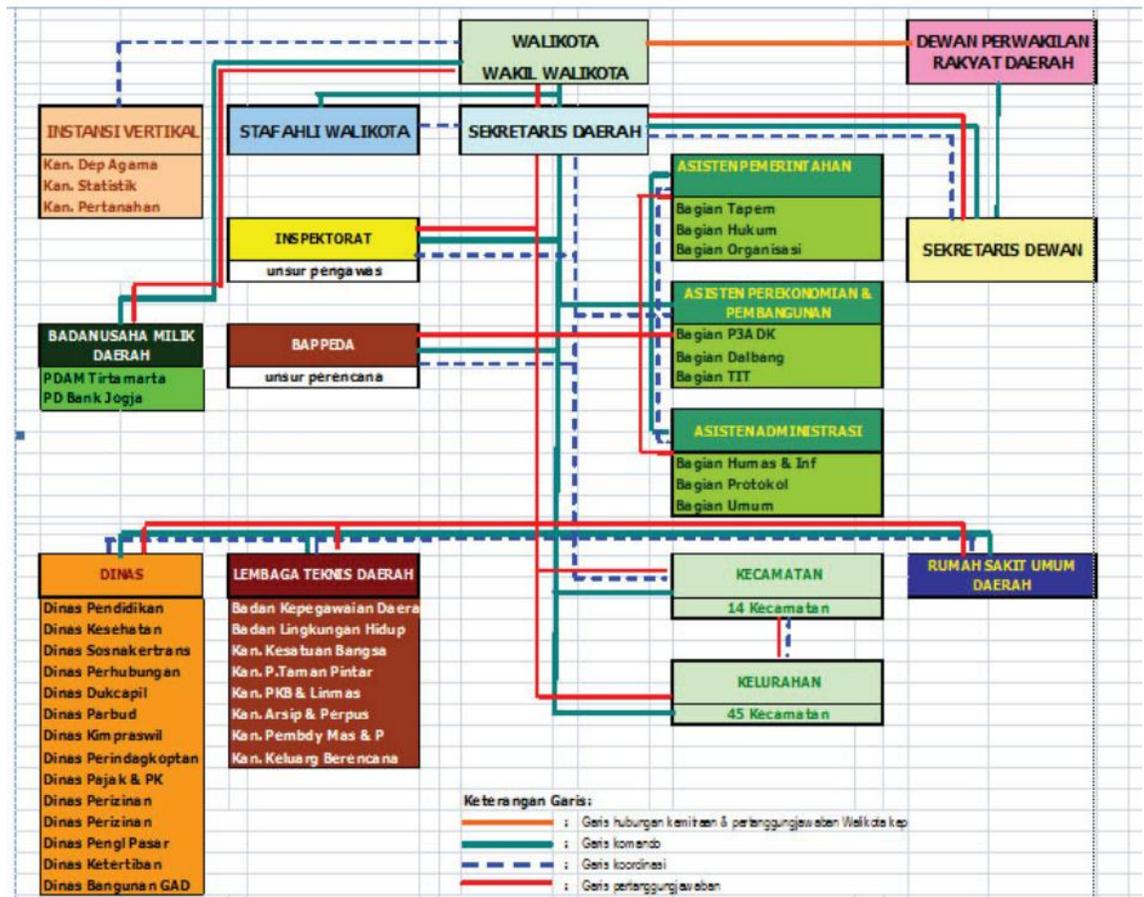
4.1.2. Kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai Daerah Otonom, sehingga ada 24 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 Urusan Pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip, serta semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Susunan organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 10 Lembaga Teknis Daerah, 1 Lembaga lain, 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dan 75 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008, Nomor 9 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 11 Tahun 2008, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata laksana BPBD Kota Yogyakarta. Adapun susunan kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 3 Januari 2009 hingga sampai Tahun 2015 disajikan struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta



Sumber : LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta 2015.

Sedangkan, untuk kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sampai dengan akhir Tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta didukung oleh 7.623 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Guru sebanyak 3.502 orang (45,94%), dan non guru sebanyak 4.121 orang

(54,06%). Berdasarkan Analisa Jabatan kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta idealnya adalah 11.495 orang yaitu 3.314 guru dan 8.181 non guru yang terdiri dari struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu selain guru, sehingga sampai 31 Desember 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta masih kekurangan SDM sebanyak 3.872 orang atau 33.68%. Adapun sebaran PNS berdasarkan tingkat pendidikan tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Penempatan di DIY Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Daerah Penempatan						Jumlah
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY	
1	SD	87	97	111	80	165	155	695
2	SLTP Umum	198	226	274	213	242	232	1.385
3	SLTP Kejuruan	5	7	12	13	13	37	87
4	SLTA Umum	2.074	2.523	2.301	2.566	1.720	2.277	13.461
5	D-I	68	89	54	93	32	17	353
6	D-II	1.103	1.313	1.363	1.407	558	54	5.798
7	D-III	848	1.295	969	1.304	888	666	5.970
8	D-IV	76	107	85	87	75	117	547
9	Sarjana	3.121	4.949	4.773	5.345	3.642	2.985	24.815
10	Pasca Sarjana	256	435	346	480	278	502	2.297
11	Doktor	0	0	1	1	0	2	4
	Jumlah	7.836	11.041	10.289	11.589	7.613	7.044	55.412

Sumber: Data diolah.

Dari tabel diatas, sebaran Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 7.613 PNS. Dari keseluruhan PNS di Provinsi DIY sebanyak 55.412 jiwa. Posisi PNS Pemerintah Kota Yogyakarta menduduki urutan ke 5 dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada. Hal ini juga di ungguli dari level

golongan pendidikan sarjana berjumlah 3.642 orang. Kemudian diikuti dari level pendidikan SLTA berjumlah 1.720 orang.

4.2. Profil Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Visi, Misi dan Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Yakni:

1. Visi Dinas Koperasi, UKM, Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

“Terwujudnya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia seutuhnya, penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri serta berkelanjutan”.

2. Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

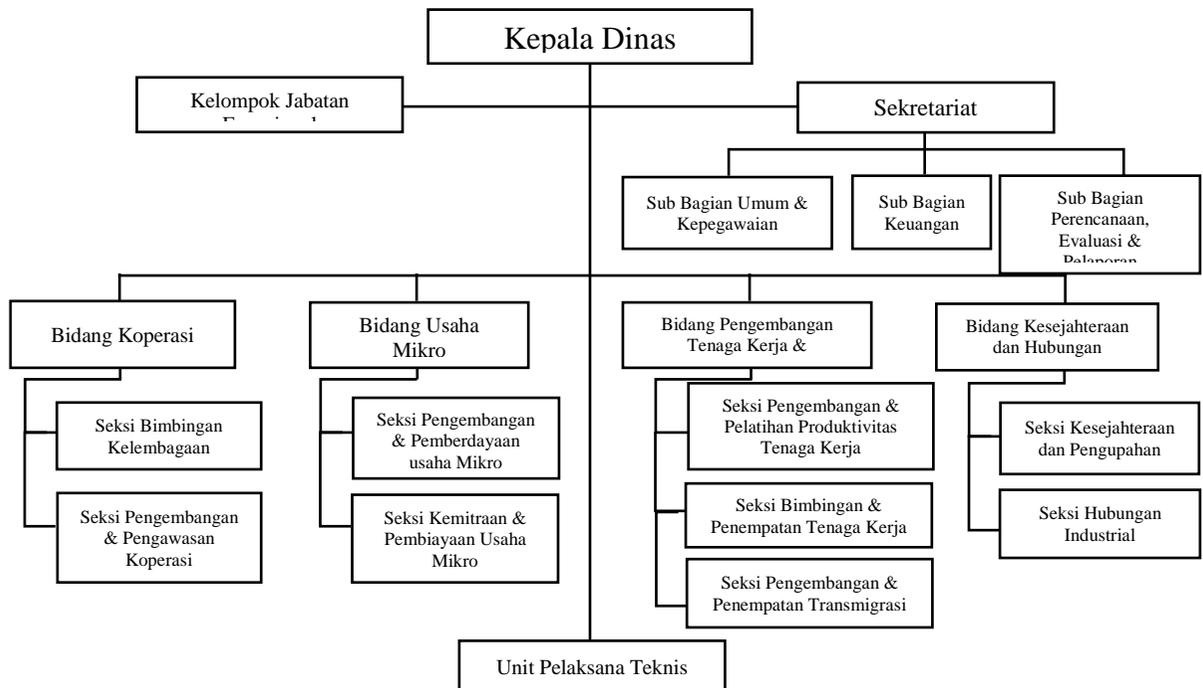
- a. Mewujudkan profesionalisme SDM internal dan optimalisasi ketatausahaan

- b. Mewujudkan Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
 - c. Mewujudkan pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja.
 - d. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan.
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
- Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1) Seksi Bimbingan Kelembagaan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi

- d. Bidang Usaha Mikro, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
 - 2) Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro
- e. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi
- f. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, membawahi:
 - 1) Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan
 - 2) Seksi Hubungan Industrial
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi dan Rincian Tugas dirincikan lebih lanjut pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016. Dibawah ini disajikan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta:

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta



4. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 140 orang, yang terdiri dari atas:

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 122 orang
- 2) Berdasarkan jenis kelamin
 - a) Laki-laki : 62 orang

- b) Perempuan : 60 orang
- 3) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan
- a) Pegawai Golongan IV : 11 orang
 - b) Pegawai Golongan III : 83 orang
 - c) Pegawai Golongan II : 23 orang
 - d) Pegawai Golongan I : 5 orang
- 4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- a) Magister / S2 : 4 orang
 - b) Sarjana / S1 : 55 orang
 - c) Sarjana Muda / D3 : 12 orang
 - d) SMA / sederajat : 41 orang
 - e) SMP / sederajat : 8 orang
 - f) SD / sederajat : 2 orang
- 5) Pegawai Tidak Tetap / NABAN : 18 orang
- a) NABAN : 17 orang
 - b) NABAN Keahlian Khusus S1 : - orang
 - c) NABAN Keahlian Khusus D3 : 1 orang

Adapun dari sebanyak 40 Pegawai yang ada, terdiri atas:

- 1) Staf Sekretariat : 23 orang
- 2) Staf Bidang Rehabilitasi Sosial : 11 orang
- 3) Staf Bidang BPKS : 10 orang
- 4) Staf PTK : 18 orang
- 5) Staf Bidang Was & HI : 6 orang
- 6) Panti Jompo : 5 orang
- 7) Panti Anak : 6 orang
- 8) Panti Karya : 9 orang

b. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi:

1) Perlengkapan

Jumlah sarana & prasarana kerja:

- a) Kendaraan roda empat : 9 buah
- b) Kendaraan roda dua : 52 buah
- c) Ruang rapat : 5 buah
- d) Mesin ketik : 38 buah
- e) Komputer : 28 buah

f) Printer	: 24 buah
g) Telepon	: 1 buah ext. 11 buah
h) Mesin fax	: 1 buah
i) Meja Kerja	: 182 buah
j) Kursi Kerja	: 326 buah
k) Almari	: 84 buah
l) Filling Cabinet	: 49 buah

5. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta:

- 1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - a) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri
 - b) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja
- 2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a) Penempatan Tenaga Kerja
 - b) Pengembangan Pasar Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

- a) Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
 - b) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3
- 4) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- a) Penempatan Transmigrasi

4.2.1. Kondisi Ketenagekerjaan

Secara keseluruhan untuk jumlah penempatan tenaga kerja berdasarkan mekanisme AKL, AKAD dan AKAN mengalami peningkatan dari 2.039 orang pada tahun 2015 meningkat sebesar 2.051 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini walaupun sedikit, namun cukup signifikan untuk kategori perempuan yang mayoritas mendominasi antar kerja lokal (AKL). Selanjutnya disajikan tabel mengenai jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar menurut jabatan pada tahun 2015-2016:

Tabel 4.3.
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Jabatan
Tahun 2015-2016

No.	JABATAN	Tahun 2015			Tahun 2016		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tenaga Profesional Teknis dan Tenaga YBDI	356	226	582	311	210	521
2	Tenaga Kepemimpinan, Ketatalaksanaan	29	12	41	80	62	142
3	Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga YBDI	61	63	124	89	39	128
4	Tenaga Usaha Penjualan	164	240	404	42	48	90
5	Tenaga Usaha Jasa	203	160	363	166	181	347
6	Tenaga Pertanian dan Tenaga YBDI	0	0	0	-	-	-
7	Tenaga Produksi dan Tenaga YBDI	134	66	200	22	4	26
	JUMLAH	947	767	1,714	710	544	1,254

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar menurut jabatan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1.254 orang yang sebelumnya sebesar 1.714 orang pada tahun 2015. Penurunan ini berjumlah 460 orang, didominasi kategori laki-laki yang berjumlah 237 orang dari 947 pada tahun 2015, dan menurun sebesar 710 pada tahun 2016.

Tabel 4.4.
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Sektor Lapangan
Usaha
Tahun 2015-2016

No.	K L U I	Tahun 2015			Tahun 2016		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	4	1	5	2	-	2
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	-	-	-
3	Industri Pengolahan	196	211	407	193	182	375
4	Listrik, Gas dan Air	4	0	4	29	21	50
5	Bangunan	193	20	213	38	2	40
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	182	239	421	302	362	664
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	11	0	11	134	55	189
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	161	125	286	194	127	321
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	38	44	82	272	220	492
10	Lain-lain	73	65	138	29	14	43
	JUMLAH	862	705	1,567	1,193	983	2,176

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan pada jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar menurut sektor lapangan usaha di tahun 2016 berjumlah 2.176 orang dari tahun 2015 yang sebelumnya berjumlah 1.567 orang. Peningkatan ini didominasi pada kategori laki-laki yang berjumlah sebesar 331 orang, dari 862 pada tahun 2015 menjadi 1.193 orang pada tahun 2016. Sedangkan kategori perempuan meningkat sebesar 278 orang dari 705 pada tahun 2015 menjadi 983 pada tahun 2016. Sebenarnya peningkatan ini sebanding dengan 50:50 dari 10 klasifikasi lapangan usaha indonesia (KLUI). Adapun KLUI yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 adalah:

1. KLUI – Listrik, Gas dan Air yang mengalami peningkatan sebesar 46 orang, yang sebelumnya berjumlah 4 orang pada tahun 2015 dengan kategori laki-laki, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 50 orang dengan kategori laki-laki sebesar 29 orang dan kategori perempuan sebesar 21 orang.
2. KLUI – Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel juga mengalami peningkatan sebesar 243 orang dari tahun 2015 yang berjumlah 421 orang menjadi 664 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini memiliki perbandingan skala 48:52 yakni kategori laki-laki meningkat menjadi 302 pada tahun 2016 yang sebelumnya hanya 182 orang pada tahun 2015. Kemudian kategori perempuan meningkat menjadi 362 orang pada tahun 2016, yang sebelumnya hanya berjumlah 239 orang pada tahun 2015.
3. KLUI – Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2015 berjumlah 11 orang dan didominasi kategori laki-laki, kemudian pada tahun 2016 berjumlah 189 orang dengan kategori laki-laki-134 dan kategori perempuan sebesar 55 orang. Hal ini mengartikan bahwa kategori laki-laki pada tahun 2016 meningkat 1.218%.
4. KLUI - Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan juga mengalami peningkatan berjumlah 321 orang pada tahun 2016, yang sebelumnya berjumlah 286 orang pada

tahun 2015. Kategori yang mendominasi terjadi pada kategori laki-laki sebesar 33 orang dari 161 meningkat menjadi 194. Sedangkan kategori perempuan bertambah 2 orang, meningkat dari 125 orang menjadi 127 orang pada tahun 2016.

5. KLUI – Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan juga mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 82 orang meningkat sebesar 492 orang pada tahun 2016. Masing-masing kategori memberikan kontribusi pada peningkatan ini. Kategori perempuan meningkat dari 44 orang menjadi 220, sedangkan kategori laki-laki meningkat dari 38 orang menjadi 272 orang pada tahun 2016.

Selanjutnya disajikan tabel mengenai jumlah penduduk yang bekerja menurut jabatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2016:

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan di Kota Yogyakarta
Tahun 2015-2016

Jabatan	2015	2016
Tenaga Profesional	22.278	24.203
Tenaga Kepemimpinan	7.397	28.353
Tenaga Tata Usaha	26.269	20.470
Tenaga Usaha Penjualan	70.798	67.663
Tenaga Usaha Jasa	27.664	35.431
Tenaga Usaha Pertanian	997	320
Tenaga Produksi dan Lainnya	60.621	58.359
Jumlah	216.024	234.799

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja menurut jabatan di Kota Yogyakarta tahun 2016 secara garis besar mengalami peningkatan berjumlah 234.799 orang, yang sebelumnya berjumlah 216.024 orang pada tahun 2015.

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Status Pekerjaan Utama	2015	2016
Berusaha Sendiri tanpa bantuan	33.932	39.953
Berusaha Dengan Dibantu	18.226	9.131
Berusaha Dengan Buruh	10.081	7.884
Pekerja / Buruh / karyawan	130.841	133.951
Pekerja Bebas di Pertanian	-	-
Pekerja Bebas di Non Pertanian	3.914	9.833
Pekerja tak dibayar	19.030	9.297
Jumlah	216.024	210.049

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Selain itu data tabel dibawah ini disajikan mengenai jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar menurut wilayah kerjanya di Kota Yogyakarta:

Tabel 4.7.
Jumlah Tenaga Kerja Asing Terdaftar Menurut Wilayah Kerjanya Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Amerika Serikat	2	3
2	Australia	-	1
3	Austria	2	
4	Belanda	3	2
5	Belgia	1	1
6	British	-	
7	China	2	
8	India	2	3
9	Inggris	-	
10	Irak	-	

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016
11	Italia	-	
12	Jepang	-	
13	Jerman	-	3
14	Kanada	1	
15	Kenya	-	
16	Korea Selatan	-	1
17	Malaysia	-	-
18	New Zeland	1	1
19	Norwegia	1	1
20	Perancis	1	3
21	Philipina	-	
22	Spanyol	-	
23	Swiss	-	
	JUMLAH	16	19

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Dari tabel diatas, untuk jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar menurut wilayah kerjanya di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 berjumlah 16 orang, sedangkan tahun 2016 berjumlah 19 orang. Dari masing-masing sektor lapangan usaha dan sebaran negara yang dituju mengalami peningkatan sebesar 3 orang dari jumlah 19 orang.

4.2.2. Kondisi Pengangguran

Selanjutnya, mengenai pengangguran ini digolongkan dengan 7 kategori, sebagaimana dijelaskan pada istilah definisi profil tahunan 2016 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta :

1. Setengah penganggur

Adalah mereka yang bekerja tetapi tidak memenuhi keseluruhan standar ukuran jam kerja dan produktivitas atau pendapat.

2. Setengah penganggur kentara

Adalah orang yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jumlah jam kerja normal.

3. Setengah penganggur tidak kendara

Adalah orang yang bekerja memnuhi jam kerja normal, namun ia bekerja pada jabatan/posisi yang sebelumnya membutuhkan kualifikasi dibawah yang ia miliki.

4. Setengah penganggur potensial

Adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas menghasilkan output yang rendah yang disebabkan oleh faktor-faktor organisasi, teknis, dan ketidakcukupan lain pada tempat/perusahaan dimana ia bekerja.

5. Setengah penganggur kritis

Adalah orang yang bekerja kurang dari 15 jam perminggu.

6. Penganggur bruto

Adalah penganggur terbuka ditambah setengah penganggur.

7. Mencari pekerjaan tetapi tidak sedang bekerja

Adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti : sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Selanjutnya, tabel dibawah ini menjelaskan jumlah lowongan yang terdaftar menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 4.8.
Jumlah Lowongan Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 - 2016

No.	PENDIDIKAN	Tahun 2015			Tahun 2016		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	TTSD / SD	12	8	20	0	0	0
2	SLTP	22	16	38	1	1	2
3	SLTA	679	563	1,242	494	449	943
4	D1/D2 / D3	123	113	236	130	232	362
5	S1 / S2 / S3	318	261	579	681	472	1,153
JUMLAH		1,154	961	2,115	1,306	1,154	2,460

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Jumlah lowongan yang terdaftar menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2016 mengalami peningkatan, sebelumnya berjumlah 2.115 orang pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.460 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini didukung dari kategori laki-laki sebanyak 152 orang, sedangkan kategori perempuan sebanyak 193 orang pada 2016. Meskipun penurunan terjadi pada golongan pendidikan TTSD/SD,

SLTP, dan SLTA. Namun, peningkatan pada tahun 2016 yang terjadi ini ditopang dari golongan pendidikan D1/D2/D3 sebesar 362 orang, dan golongan pendidikan S1/S2/S3 pada tahun 2016 sebesar 1.153 orang.

Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah lowongan yang terdaftar menurut jabatannya pada tahun 2015 dan 2016, yang diklasifikasikan berdasarkan lapangan usaha indonesianya (KLUI) dengan 7 indikator.

Tabel 4.9.
Jumlah Lowongan Terdaftar Menurut Jabatan
Tahun 2015 -2016

No.	K L U I	Tahun 2015			Tahun 2016		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tenaga Profesional Teknis dan Tenaga YBDI	393	172	565	396	331	727
2	Tenaga Kepemimpinan, Ketatalaksanaan	126	84	210	89	68	157
3	Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga YBDI	169	177	346	372	520	892
4	Tenaga Usaha Penjualan	178	201	379	144	144	288
5	Tenaga Usaha Jasa	28	12	40			-
6	Tenaga Pertanian dan Tenaga YBDI	-	-	-	4	-	4
7	Tenaga Produksi dan Tenaga YBDI	115	76	191	371	146	517

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah lowongan yang terdaftar menurut jabatannya, di topang dengan peningkatan yang cukup drastis. Yang sebelumnya sebesar 191 orang pada tahun 2015, meningkat menjadi 517 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini hampir 2x lipat dari tahun 2015, yakni sebesar 326 orang. Peningkatan ini di

bantu dari klasifikasi lapangan usaha Tenaga Profesional Teknis dan Tenaga YBDI, dengan klasifikasi lapangan usaha Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga YBDI.

4.2.3. Kondisi Pekerjaan

Dalam kondisi pekerjaan, data tabel dibawah ini menjelaskan jumlah kesempatan kerja menurut status pekerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2016. Sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Jumlah Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Status Pekerjaan Utama	2015	2016
Berusaha Sendiri tanpa bantuan	33.932	39.953
Berusaha Dengan Dibantu	18.226	9.131
Berusaha Dengan Buruh	10.081	7.884
Pekerja / Buruh / karyawan	130.841	133.951
Pekerja Bebas di Pertanian		
Pekerja Bebas di Non Pertanian	3.914	9.833
Pekerja tak dibayar	19.03	9.297
Jumlah	216.024	210.049

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Status pekerjaan utama dengan kategori pekerja bebas di pertanian yang mengalami stagnan pada tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya dibawah ini disajikan tabel mengenai perkembangan jumlah perusahaan dan tenaga kerja pada 2016.

Tabel 4.11.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun 2016

No	K L U I	Prshn UU.7/ 1981	Tenaga Kerja			
			WNI		WNA	
			L	P	L	P
1	Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan(1)	5	60	25	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian(2)	1	105	50	0	0
3	Industri Pengolahan(3)	153	4,560	2,681	0	0
4	Listrik, Gas dan Air(4)	2	25	15	0	0
5	Bangunan(5)	74	1,606	114	0	0
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel(6)	707	14,020	7,271	3	0
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi(7)	52	2,728	310	1	1
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan(8)	214	6,422	3,654	0	0
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan(9)	252	5,535	5,528	9	5
10	Lain-lain(10)	0				
JUMLAH		1,460	35,061	19,648	13	6

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Tenaga kerja berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) pada tahun 2016, untuk WNI dengan kategori laki-laki berjumlah 35.061 orang dan kategori perempuan sebesar 19.648 orang.

4.2.4. Kondisi Usia Produktif

Sesuai dengan konsep ketenagakerjaan maka penduduk usia kerja/tenaga kerja dikelompokkan menurut tenaga kerja yang sudah bekerja, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan mereka yang tidak masuk dalam kategori cacat, pensiun. Selanjutnya dibawah ini disajikan data tabel mengenai jumlah penduduk usia kerja 15 tahun

keatas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Yogyakarta tahun 2016:

Tabel 4.12.
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Thn Keatas)
Menurut Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja
Kota Yogyakarta Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Kerja 15 th ke atas				Penduduk Usia Kerja	Ket (Jumlah Anak)
			Angkatan Kerja/AK			Bukan Ak		
			Penga Nggur	Bekerja	Jmlh			
1	Mantrijeron	35,200	349	15,609	15,958	24,282	27,590	7,610
2	Kraton	22,103	347	9,747	10,094	15,412	17,674	4,429
3	Mergangsan	31,958	417	13,599	14,016	21,986	25,029	6,929
4	Umbulharjo	68,280	559	28,953	29,512	44,955	52,621	15,659
5	Kotagede	33,199	749	15,033	15,782	22,417	25,475	7,724
6	Gondo Kusuman	42,011	926	17,737	18,663	28,588	33,249	8,762
7	Danurejan	21,344	297	9,605	9,902	15,534	16,699	4,645
8	Pakualaman	10,715	218	4,749	4,967	7,755	8,495	2,220
9	Gondomanan	15,131	330	6,860	7,190	11,243	12,033	3,097
10	Ngampilan	18,707	193	8,185	8,378	13,375	14,619	4,088
11	Wirobrajan	27,783	494	12,031	12,525	18,599	21,530	6,253
12	Gedong Tengen	20,601	475	8,734	9,209	16,087	16,367	4,234
13	Jetis	27,579	608	11,757	12,365	21,511	21,680	5,899
14	Tegalrejo	36,774	759	15,601	16,360	25,750	28,591	8,183
JUMLAH		411,385	6,721	178,200	184,921	287,494	321,652	89,732

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Pada tabel diatas, terlihat jelas untuk jumlah penduduk usia kerja untuk 15 tahun keatas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sangat variatif besaran jumlah penduduk berdasarkan Kecamatannya.

Dapat disimpulkan untuk jumlah pendduduk usia kerja 15 tahun keatas, di ungguli dari Kecamatan Umbulharjo dan yang paling sedikit

berada di Kecamatan Pakualaman. Selanjutnya, tabel dibawah ini akan menjelaskan jumlah penduduk usia kerja yang menurut kegiatan utamanya pada tahun 2016:

Tabel 4.13.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama Tahun 2016

No	Kegiatan Utama	2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Angkatan Kerja	188,555	48.23	184,921	39.14
	· Bekerja	177,676	42.46	178,200	37.72
	· Penganggur	10,879	5.77	6,721	1.42
2	Bukan Angkatan Kerja	202,435	51.77	287,480	60.86
	· Sekolah	91,297	23.35	221,070	46.80
	· Mengurus Rumah Tangga	57,282	14.65	56,909	12.05
	· Lainnya	53,856	13.77	9,501	2.01

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

4.3. Profil Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

4.3.1. Peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Untuk dapat menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergulir pada tahun 2015 lalu, Pemerintah harus dapat memberikan kebijakan dan regulasi yang memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Sehingga, tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing secara lingkup negara ASEAN. Persaingan tenaga kerja di kawasan ASEAN akan semakin terbuka, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja merupakan bagian terpenting dari investasi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam PP 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pasal 1 menjelaskan, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau Internasional.

BNSP merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi melalui uji kompetensi, bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Peran BNSP selaku lembaga yang berwenang (*authoriry body*) sebagai pelaksana kompetensi kerja untuk dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi yang lebih optimal dalam pelayanan sertifikasi kompetensi kerja secara cepat. Keanggotaan BNSP terdiri dari 15 unsur swasta dan 10 unsur Pemerintah.

Dalam membangun lembaga sertifikasi, ILO menyarankan agar setiap negara mengadopsi standar ISO 17024 “*general requirements for organisations operating systems for the certification of persons*”. Dibawah ini disajikan gambar segitiga pengembangan SDM berbasis kompetensi:



Gambar 4.3.
Segitiga Pengembangan SDM berbasis Kompetensi

Sumber: BNSP.

Dari gambar diatas, dijelaskan bahwa peran lembaga diklat profesi dan BNSP, LSP masing-masing memberikan kontribusi untuk kompetensi berbasis pelatihan dan kompetensi berbasis penilaian. Dengan tujuan akhir yang ingin dicapai industri, maka peran KKNI dan SKKNI harus melahirkan *competency based training* dan *competency based assessment*.

4.3.2. Peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Dalam pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayat 1 menjelaskan, Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga

sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Tugas dan fungsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai berikut:

1. Membuat materi uji kompetensi.
2. Menyediakan tenaga penguji (asesor).
3. Melakukan asesmen.
4. Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI.
5. Menjaga kinerja asesor dan TUK.
6. Membuat materi uji kompetensi.
7. Pengembangan skema sertifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dipersiapkan pembentukannya oleh suatu panitia kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan asosiasi industri terkait. Dengan susunan panitia kerja terdiri dari ketua bersama sekretaris, dibantu beberapa anggota. Personal panitia mencakup unsur industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait dan pakar. Sehingga wewenang dari LSP ialah:

1. Menetapkan biaya kompetensi.
2. Menerbitkan sertifikat kompetensi.
3. Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi.
4. Menetapkan dan memverifikasi TUK.

5. Memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan.
6. Mengusulkan standar kompetensi baru.

Berikut disajikan daftar LSP yang diakui oleh BNSP:

Tabel 4.14.
Daftar LSP yang diakui BNSP

No	Nama LSP	Bergerak pada Bidang
1	LSP Teknisi Otomotif	Otomotif
2	LSP Telematika	Teknologi Informasi
3	LSP Tenaga Laboratorium Pengujian Indonesia (TELAPI)	Laboratorium
4	LSP Logam dan Mesin	Permesinan
5	LSP Lembaga Keuangan Mikro CERTIF	Keuangan
6	LSP Garmen	Garmen dan Tekstil
7	LSP Pariwisata	Pariwisata dan Perhotelan
8	LSP Lembaga Uji Kompetensi (LUK)	Tata Laksana Rumah Tangga
9	LSP Maritim Indonesia	Kelautan
10	LSP Lembaga Sertifikasi Kompetensi TKI (LSK)	Tata Laksana Rumah Tangga
11	LSP Minyak dan Gas (PPT MIGAS)	Migas dan Pertambangan
12	LSP APSI (Administratif Profesional & Sekretaris Indonesia)	Administrasi dan Sekretaris
13	LSP IATKI (Ikatan Ahli Teknik Kelistrikan Indonesia)	Kelistrikan
14	LSP Coating Indonesia	Coating
15	LSP Geomatika	Geologi dan Geografi
16	LSP TIK Indonesia (Teknologi Informasi & Telekomunikasi Indonesia)	Teknologi Informasi
17	LSP Pariwisata Indonesia	Pariwisata
18	LSP Nusantara	Tata Laksana Rumah Tangga
19	LSP COHESPA (Cosmetology Health, Esthetic & Spa)	Kecantikan
20	LSP Pariwisata Nusantara	Pariwisata
21	LSP Kecantikan	Kecantikan
22	LSP Las	Pengelasan
23	LSP PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia)	Pertambangan Mineral dan Batu Bara
24	LSP Koperasi Jasa Keuangan (KJK)	Koperasi dan Keuangan
25	LSP Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR)	Manajemen Resiko
26	LSP Teknisi Akuntansi (TA)	Keuangan
27	LSP Perbankan (LSPP)	Keuangan
28	LSP Hotel dan Restoran	Restoran dan Perhotelan
29	LSP Refraksi Optisi Indonesia (ROI)	Optik
30	LSP Kereta Api (KA)	Perhubungan dan Transportasi
31	LSP Furnitur & Kayu Olahan (FURNIKO)	Furniture
32	LSP Teknik Listrik	Kelistrikan
33	LSP Spa Nasional	Kecantikan
34	LSP Kehutanan Indonesia	Kehutanan
35	LSP Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
36	LSP Register Nurse (RN)	Suster
37	LSP Jasa Pengelola Keuangan Pratama	Keuangan
38	LSP LSK-K3 ICCOSH	Keamanan dan Keselamatan
39	LSP Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia	Keuangan
40	LSP STIKES Bakti Tunas Husada (BTH) Tasikmalaya	Kesehatan
41	LSP Instruktur Kursus Indonesia (IKI)	Sumber Daya Manusia

No	Nama LSP	Bergerak pada Bidang
42	LSP Ikatan Property Manager Indonesia (IPMI)	Properti
43	LSP Geologi Pertambangan & Panas Bumi (GPPB)	Geologi
44	LSP Tekstil	Tekstil
45	LSP Akademi Pariwisata Makassar	Pariwisata
46	LSP Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Pariwisata
47	LSP Kentucky Fried Chicken (KFC)	Makanan
48	LSP TLRT Indonesia	Tata Laksana Rumah Tangga
50	LSP Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali	Pariwisata
51	LSP Akademi Pariwisata Medan	Pariwisata
52	LSP Pariwisata Nasional	Pariwisata
53	LSP MICE (Meeting Incentive Convention & Exhibition)	Event Organizer
54	LSP Akpindo-Stein	Pariwisata
55	LSP Ekspor Impor Indonesia	Ekspor dan Impor
56	LSP Air Minum Indonesia	Air Minum
57	LSP Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk
58	LSP Manajemen Keuangan	Keuangan
59	LSP ATDA (Air Transport Distribution Services & Agencies)	Pariwisata dan Travel
60	LSP Kompetindo Lintas Buana (KTLB)	Tata Laksana Rumah Tangga
61	LSP Pusat K3	Keamanan dan Keselamatan
62	LSP Wiyata Nusantara	Pariwisata
63	LSP Persemenan Indonesia	Semen
64	LSP Rimbawan Indonesia (RINO)	Kehutanan
65	LSP Duta Bangsa	Tata Laksana Rumah Tangga
66	LSP Konsultan Industri Kecil dan Menengah	Konsultan
67	LSP Ahli Rias Pengantin	Kecantikan
68	LSP Minyak dan Gas (MIGAS)	Pertambangan dan Energi
69	LSP Alas Kaki	Industri
70	LSP TLRT Mandiri	Tata Laksana Rumah Tangga
71	LSP Klining Servis	Klining Servis
72	LSP ATMI Surakarta	Pendidikan
73	LSP Penyuluh Pertanian PNS	Pertanian
74	LSP Koperasi	Koperasi dan Keuangan
75	LSP Hotel dan Pariwisata Medan	Pariwisata
76	LSP Auditor Forensik	Forensik
77	LSP Rias Pengantin Modifikasi Moderern Katalia	Kecantikan
78	LSP Himpunan Ahli Konservasi Energi	Konservasi
79	LSP Jasa Boga Indonesia	Jasa Boga
80	LSP INTALA	Jasa Kemasyarakatan Sosial
81	LSP Manajemen Industri Akademi Pimpinan Perusahaan	Manajemen Industri
82	LSP Krakatau Steel	Pertambangan
83	LSP Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP	Pengadaan
84	LSP SMK SMAK Padang	Pendidikan
85	LSP SMK SMAK BOGOR (SMAKBO)	Pendidikan
86	LSP Akademi Kimia Analis Bogor	Pendidikan
87	LSP Logistik Indonesia	Logistik
88	LSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat
89	LSP Garmindo Plus	Garmen
90	LSP Lemdikpol	Kepolisian
91	LSP Pertanian Nasional	Pertanian
92	LSP Piksi Ganesa Bandung	Jasa Perusahaan
93	LSP Lalu Lintas Angkutan Jalan	Perhubungan dan Transportasi
94	LSP PAMA	Alat Berat
95	LSP Pramuwisata Indonesia	-
96	LSP Tenaga Teknik Indonesia	Tenaga dan Keselamatan Kerja
97	LSP PT. VALE	Pertambangan
98	LSP STT Tekstil	Tekstil
99	LSP ECITB Indonesia	Engenering

Sumber: Badan Nasional Sertifikasi Profesi